

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Geografi Pariwisata

Geografi berasal dari kata “*geo*” yang berarti bumi dan “*graphein*” yang bermakna gambaran. Secara etimologi Geografi adalah ilmu untuk melukiskan tentang bumi. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan (Seminar Lokal IGI, 1988 dalam Sejati., 2022:129).

Pariwisata merupakan aktivitas seseorang yang bepergian ke tempat di luar lingkungan biasanya kurang dari periode waktu tertentu (M. Baiquni, 2015). Pariwisata juga dapat diartikan sebagai kegiatan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan rekreasi atau pengembangan diri dalam jangka waktu tertentu (Kartiko, 2020). Perjalanan dalam pariwisata selalu bersifat sementara, yaitu setelah mencapai tujuan dan singgah sementara untuk menikmati suatu objek wisata kemudian wisatawan akan kembali ke rumah.

Geografi Pariwisata adalah cabang ilmu geografi regional yang mengkaji suatu wilayah atau region di permukaan bumi secara komprehensif, baik aspek fisik geografisnya maupun aspek manusianya (Ahman sya, 2005). Geografi selalu berhubungan dengan ruang dan waktu, karena kajian geografi itu sangat luas, maka orang seringkali menyebutnya sebagai “*mother of science*”.

1) Definisi Pariwisata

Menurut *World Tourism Organization* (WTO), terdapat suatu pemahaman bahwa pariwisata merupakan kegiatan manusia yang melakukan perjalanan dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya.

Menurut undang-undang No.9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud dengan Kepariwisataaan adalah sebagai berikut:

- a) Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek atau daya tarik wisata.
- b) Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- c) Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
- d) Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- e) Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa.

2) Bentuk dan Jenis Objek Pariwisata

Industri pariwisata harus mampu menyediakan produk wisata sesuai dengan latar belakang yang akan dikembangkan, sehingga dalam proses pengembangannya sesuai dengan daya dukung dan kemampuan yang ada. Menurut Ditjen Pariwisata Republik Indonesia (Khotimah, 2008) bahan dasar industri pariwisata dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a) Objek wisata alam (*Natural resource*)

Objek wisata alam merupakan sebuah bentuk wisata yang berupa pemandangan lingkungan alam, pegunungan, pantai, danau serta kehidupan flora dan fauna didalamnya atau segala aktivitas yang dilakukan di alam serta memanfaatkan potensi alamnya.

b) Objek wisata budaya/manusia (*Human resource*)

Objek wisata budaya atau manusia merupakan wisata yang didominasi oleh aktivitas manusia dan wujud dari wisata budaya diantaranya museum, kampung adat, kesenian, upacara adat, dan sebagainya.

c) Objek wisata buatan manusia (*Man-made resource*)

Objek wisata buatan manusia dipengaruhi oleh seluruh aktivitas manusia dalam bentuk yang sangat bergantung pada kreativitas manusia.

3) Syarat-Syarat Pariwisata

Menurut Maryani (1991) dalam (Mardalis & Wijaya, 2016), syarat-syarat daya tarik pariwisata yaitu:

a) *What to see*

Tempat yang dijadikan objek wisata harus memiliki perbedaan dengan wisata di tempat lain. Artinya pariwisata tersebut memiliki daya tarik khusus yang ditonjolkan kepada wisatawan. *What to see* meliputi hal-hal yang dipamerkan kepada wisatawan seperti pemandangan alam, kesenian, dan atraksi wisata.

b) *What to do*

What to do meliputi apa saja yang dilakukan di lokasi pariwisata. Konsep *what to do* memicu objek wisata untuk menyediakan fasilitas, atraksi, dan pelayanan pariwisata yang baik agar dapat menarik wisatawan untuk betah berlama-lama di tempat itu atau bahkan kembali berwisata lagi di kemudian hari.

c) *What to buy*

Objek pariwisata harus menyediakan sesuatu yang dapat dibeli oleh wisatawan sebagai *souvenir* untuk dibawa ke daerah asli. Terlebih jika *souvenir* tersebut bertemakan budaya setempat atau kerajinan rakyat sekitar yang memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki daerah lain.

d) *What to arrived*

Daya tarik pariwisata juga berhubungan dengan aksesibilitas terhadap lokasi pariwisata. Seperti bagaimana rute untuk menuju kesana, ketersediaan kendaraan umum, dan medan serta waktu perjalanan. Sarana prasarana yang baik akan menarik wisatawan dalam jangkauan yang lebih luas.

e) *What to stay*

What to stay berhubungan dengan bagaimana dan dimana wisatawan akan tinggal untuk sementara waktu selama berkunjung. Sehingga diperlukan penginapan seperti hotel ataupun *homestay*.

4) Unsur-Unsur Pariwisata

Menurut Pendit 2003, unsur-unsur yang terlibat dalam industri pariwisata meliputi hal-hal berikut:

- a) Akomodasi, tempat seseorang untuk tinggal sementara.
- b) Jasa boga dan restoran, industri jasa dibidang penyelenggaraan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
- c) Transportasi dan jasa angkutan, industri yang bergerak dibidang angkutan darat, laut amupun udara.
- d) Atraksi wisata, kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan atau pengunjung.
- e) Cinderamata (*souvenir*), benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asal;
- f) Biro perjalanan, badan usaha pelayanan semua proses perjalanan wisata dari berangkat hingga kembali.

2.1.2 Desa Wisata

1) Definisi Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat pedesaan dengan segala potensinya. Desa wisata merupakan sebuah pariwisata dengan cara pemanfaatan kondisi alamiah dari suatu wilayah yang kemudian menjadi objek wisata dengan tidak dibuat-buat (H. N. Mari, 2022).

2) Syarat-syarat Desa Wisata

Menurut Nuryanti, Wiendu (1993) dalam (Priyano, 2016) suatu desa dikatakan sebagai Desa Wisata adalah harus memenuhi beberapa syarat ataupun kriteria diantaranya:

- a) Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.

- b) Memiliki objek-objek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek wisata.
- c) Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta wisatawan yang datang ke desanya.
- d) Keamanan di desa tersebut terjamin.
- e) Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
- f) Beriklim sejuk atau dingin.
- g) Berhubungan dengan objek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

3) Prinsip-prinsip Pengembangan Desa Wisata

Menurut Kementerian Pariwisata dalam Buku Panduan Wisata 2020, prinsip pengembangan desa wisata diantaranya:

- 1) Keaslian. Atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi di desa tersebut.
- 2) Masyarakat setempat. Atraksi yang ditampilkan merupakan tradisi keseharian masyarakat setempat.
- 3) Keterlibatan masyarakat. Masyarakat secara aktif terlibat dalam upaya pengembangan desa wisata.
- 4) Sikap dan nilai. desa wisata dalam pengembangan tetap menganut sistem sikap dan nilai budaya leluhur untuk menghargai norma yang berlaku.
- 5) Konversi dan daya dukung. Pengembangan desa wisata harus mengacu pada daya dukung dan daya tampung wilayah.

2.1.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan terhadap sesuatu yang lain sehingga menimbulkan pengaruh baik bagi keduanya maupun salah satunya. Sedangkan masyarakat merupakan kesatuan unsur manusia yang mendiami wilayah tertentu yang diatur oleh nilai dan norma. Partisipasi

masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan, ketertiban dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung (Muh Yusuf, 2020).

1) Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Dirjen PMD Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Depdagri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, dan partisipasi keterampilan (Ira & Muhamad, 2020):

- 1) Partisipasi buah pikir, adalah partisipasi berdasarkan kontribusi ide-ide atau konsep penyusunan rencana suatu kegiatan. Wujud partisipasi buah pikir seperti ikut menyumbangkan ide dan gagasan melalui kehadiran dalam rapat atau musyawarah.
- 2) Partisipasi tenaga, partisipasi ini tidak hanya dilakukan pada saat pelaksanaan pariwisata, namun dilaksanakan sejak perencanaan terutama untuk sarana prasarana di lokasi pariwisata.
- 3) Partisipasi harta benda, adalah partisipasi masyarakat baik perorangan atau instansi yang membantu pariwisata dalam hal pendanaan. Misalnya lembaga swasta sebagai donator, atau masyarakat yang sekedar memberikan makanan ketika kerja bakti dalam kawasan pariwisata.
- 4) Partisipasi keterampilan, yaitu bentuk partisipasi dalam keterampilan atau keahlian yang dimiliki untuk membantu proses pelaksanaan kegiatan pariwisata.

2) Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat

Jenis-jenis partisipasi masyarakat dibedakan berdasarkan sistem mekanismenya, yaitu menurut Cohen dan Uhoff, 1977 dalam (Wahyuni, 2019):

- a) *Participation in decision making* adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan suatu keputusan dan kebijakan organisasi dalam pengelolaan pariwisata.

- b) *Participation in implementation* adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan.
- c) *Participation in benefit* adalah partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan suatu pembangunan.
- d) *Participation in evaluation* adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasilnya.

3) Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat

Menurut teori Angel dalam (Tumbel Mentari, 2017), terdapat 5 faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, diantaranya:

- a) Usia, mempengaruhi produktivitas seseorang. Orang yang memiliki usia yang relatif muda cenderung memiliki tenaga dan pemikiran yang lebih mumpuni, berbeda dengan seseorang yang berusia lebih tua.
- b) Jenis kelamin, budaya yang mengakar di Indonesia bahwa peran perempuan dalam partisipasi masyarakat didominasi oleh laki-laki.
- c) Pendidikan, sebagai salah satu syarat dalam berpartisipasi. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk partisipasi yang dapat diberikan.
- d) Pekerjaan dan penghasilan, pekerjaan berpengaruh pada waktu luang seseorang dalam berpartisipasi misalnya dalam menghadiri rapat dalam suatu kegiatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula peluang untuk berinvestasi.
- e) Lamanya tinggal, mempengaruhi rasa memiliki terhadap lingkungannya dan rasa ingin membangun lingkungannya menjadi lebih baik.

Terdapat faktor lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:

- a) Minat, merupakan suatu perhatian yang kuat dan mendalam serta perasaan senang seseorang terhadap suatu kegiatan, yang mengarahkannya untuk melakukan kegiatan tersebut berdasarkan kemauannya (Sari et al., 2019). Adanya minat dari masyarakat dalam berpartisipasi akan memudahkan proses pengembangan suatu desa wisata.
- b) Pengetahuan pariwisata, pengetahuan merupakan bagian penting dari eksistensi manusia, karena pengetahuan merupakan aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Masyarakat dengan pengetahuan lokal mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai produk wisata yang dikembangkan dan dampaknya dibandingkan dengan masyarakat dari luar daerah wisata (Ramadhani, 2021).
- c) Pengalaman, menurut KBBI pengalaman merupakan sesuatu yang pernah dialami (dijalani, dirasakan, ditanggung). Pengalaman juga merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Pengalaman seseorang dapat ditentukan dari rentan waktu lamanya seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan tersebut (Iskandar & Safrianto, 2020).

2.1.4 Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa Kelompok Sadar Wisata dapat dikatakan sebagai kelompok yang terbentuk atas inisiatif dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif memelihara dan melestarikan berbagai objek wisata dan daya tarik wisata dalam meningkatkan pembangunan pariwisata di daerah tempat tinggalnya. POKDARWIS merupakan kelompok swadaya dan swakarya masyarakat yang dalam aktivitasnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat atau anggota POKDARWIS serta

dapat menyukseskan pembangunan kepariwisataan. Menurut pedoman Kelompok Sadar Wisata, terdapat fungsi POKDARWIS yaitu:

- 1) Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah destinasi wisata; dan
- 2) Sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah (Kabupaten Kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

Peran serta POKDARWIS dalam pengembangan wisata memiliki kedudukan sebagai garda terdepan. POKDARWIS dibentuk atas dasar kesadaran masyarakat dalam suatu tujuan atau visi bersama dalam proses pengembangan wisata dengan berbagai pembagian tugas secara struktural. Pembagian tugas pokok POKDARWIS memberikan manfaat terhadap kontribusi yang bervariasi sehingga memberikan manfaat terhadap kontribusi yang bervariasi sehingga memberikan kesan menarik bagi wisatawan.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan memerlukan berbagai upaya pemerdayaan (*empowerment*), agar masyarakat dapat berperan lebih aktif dan optimal serta menerima manfaat positif dari kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Fungsi POKDARWIS sangat diperlukan dalam mengkoordinasi partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan wisata. Proses pembangunan kepariwisataan pada umumnya akan melibatkan seluruh elemen yang terbagi menjadi tiga pihak yaitu: pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Peran ketiganya harus memiliki keseimbangan, dan kontroling salah satunya oleh POKDARWIS (Andiani & Widyastini, 2017).

2.1.5 Karang Taruna

Karang taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 23 Tahun

2013 tentang pemberdayaan Karang Taruna, pasal 1 angka (1) pengertian karang taruna adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas adasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, serta untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan.

Tugas pokok karang taruna yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 83/HUK/2005 adalah organisasi sosial wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan kepedulian sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Karang taruna memiliki tujuan Bersama untuk tumbuh dan berkembang memiliki anggota dengan keterampilan dan kualitas serta karakter yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial terutama kaum muda. Karang taruna sebagai suatu organisasi kepemudaan memiliki peranan dalam masyarakat dimana saat ini karang taruna tumbuh dan berkembang keseluruh pelosok-pelosok baik di tingkat RW, Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Karang taruna bisa menjadi aset bangsa dengan potensi yang dimiliki terus dikembangkan kearah yang positif sehingga para pemuda bias menggali dan menjadi salah satu penggerak pembangunan secara lokal didaerahnya sendiri. Prinsip kepedulian sosial merupakan sikap yang harus dimiliki setiap anggota karang taruna yang harus direalisasikan di lingkungan masyarakat (Muliati, 2016).

2.1.6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut undang-undang No 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, yang dipisahkan untuk mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes bertujuan untuk mengkoordinasi pemanfaatan dan pemutaran sumber keuangan desa

sehingga tersistematis. Tujuan lain dari BUMDes untuk memperkuat perekonomian desa, melalui peningkatan pendapatan asli dari desa itu baik dari pengelolaan sumberdaya alam maupun sektor perekonomian yang lainnya. Pendapatan asli desa merupakan sebuah hal utama yang harus dicapai dan dikelola secara baik oleh BUMDes sehingga adanya kemandirian dari pendapatan desa untuk masyarakat desa guna memperkuat ekonomi masyarakat desa.

BUMDes dibentuk menjadi sebuah lembaga dibawah naungan pemerintah desa yang merupakan peran pemerintah desa yang merupakan peran pemerintah untuk membantu terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui ekonomi desa mandiri dan produktif. Pembentukan BUMDes harus berdasarkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memaksimalkan potensi yang ada di desa yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya baik secara langsung maupun tidak langsung (Herman et al., 2019).

Sebagai penggerak ekonomi desa BUMDes harus memiliki skema dalam meningkatkan pendapatan asli desa dengan melihat dan mempertimbangkan potensi terbesar yang ada di desa. Pada kegiatan pergerakan perekonomian BUMDes harus memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibedakan sesuai dengan bidang serta karakteristik bidang ekonomi yang ditekuni (Nugrahaningsih et al., 2021).

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam penelitian ini disajikan dalam tabel:

Tabel 2. 1
Perbandingan Penelitian yang Relevan

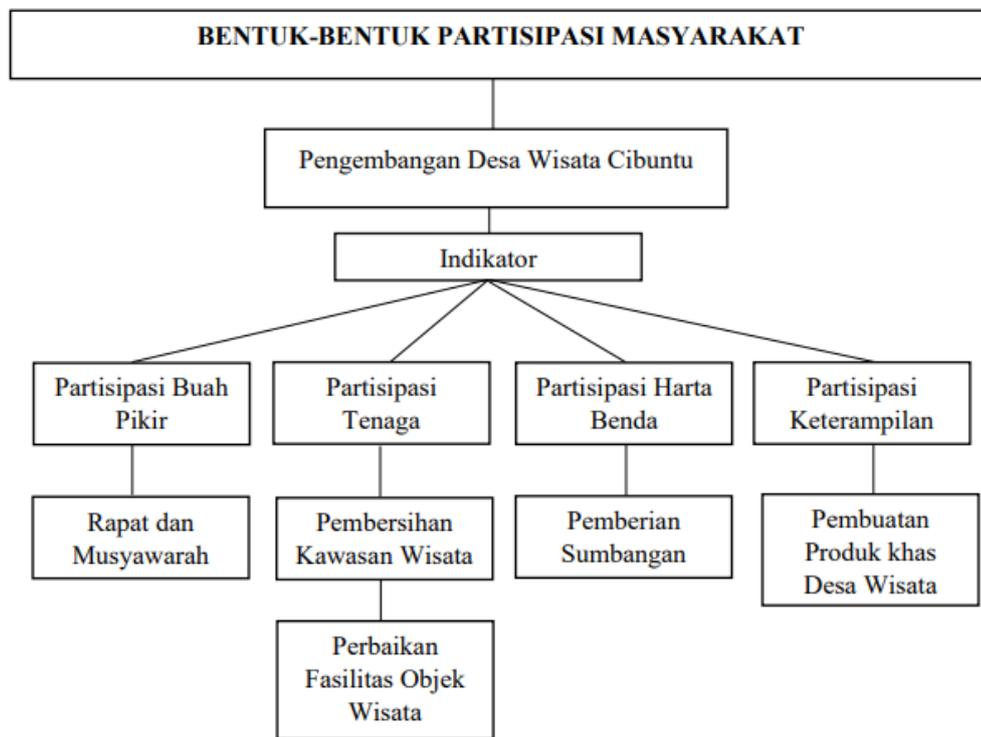
No	Aspek	Penelitian 1 (Skripsi)	Penelitian 2 (Skripsi)	Penelitian 3 (Jurnal)	Penelitian yang dilakukan
1	Penulis	Azmy Chusnul Bani Asy Syahidah	Riri Lestari	Budhi Pamungkas, Ayu Krishna Yulawati, Netti Siska, Endah Fitriyani dan Ilma Indriasri	Putri Susilawati
2	Judul	Pengembangan Potensi Desa Wisata Sindang Kasih di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut	Partisipasi Masyarakat dalam Pengemba- ngan Desa Wisata Puspamukti Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya	Pengemba- ngan Desa Wisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat	Partisipasi Masyarakat dalam Pengemba- ngan Desa Wisata di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan
3	Tahun	2023	2023	2020	2023
4	Instansi	Universitas Siliwangi	Universitas Siliwangi	Universitas Pendidikan Indonesia	Universitas Siliwangi
5	Rumus an Masala h	1. Potensi apa saja yang dimiliki Desa Wisata Sindang Kasih di Desa Sukamaju Kecamatan	1. Bagaimana potensi Desa Puspamukt i sebagai Desa Wisata di Kecamatan Cigalontan g Kabupaten	1. Bagaimana pengemba ngan Desa Wisata Kecamatan Pagerageu ng Kabupaten Tasikmala ya?	1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengemba ngan Desa Wisata di Desa Cibuntu Kecamatan

		Cilawu Kabupaten Garut? 2. Bagaimana upaya pengembangan Desa Wisata Sindang Kasih dalam Peningkatan Sosial Ekonomi masyarakat Sindang Kasih di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut?	Tasikmalaya? 2. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Puspamukti Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya?	2. Bagaimana peranan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya?	Pasawahan Kabupaten Kuningan? 2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan?
6	Metode Penelitian	Deskriptif Kuantitatif	Deskriptif Kuantitatif	Kualitatif	Deskriptif Kuantitatif

2.3 Kerangka Konseptual

2.3.1 Kerangka Konseptual I

Berdasarkan rumusan masalah yang pertama Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan sebagai berikut:

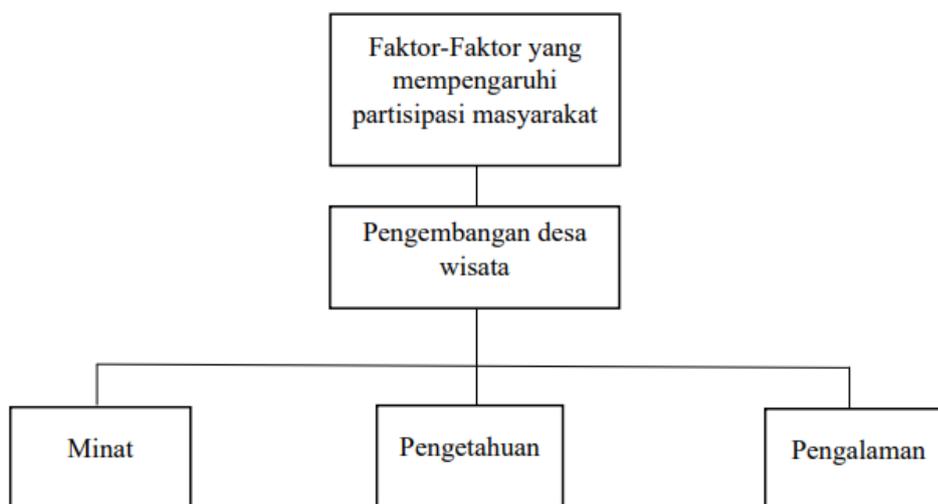


Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual I

Kerangka konseptual yang pertama berdasarkan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata terbagi menjadi empat indikator yaitu: *pertama* partisipasi buah pikir yaitu rapat musyawarah. Kedua partisipasi tenaga kerja meliputi pembersihan kawasan wisata serta pembangunan dan perbaikan fasilitas objek wisata. Ketiga partisipasi harta benda yaitu pemberian sumbangan bagi pengembangan Desa Wisata Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, dan keempat partisipasi keterampilan yaitu pembuatan produk khas Desa Wisata Cibuntu.

2.3.2 Kerangka Konseptual II



Gambar 2. 2

Kerangka Konseptual II

Kerangka konseptual yang kedua merupakan sebuah gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan Desa Wisata Cibuntu. Faktor-faktor tersebut terdiri atas minat, pengetahuan, pendidikan dan pengalaman.

2.4 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan terbagi atas empat bentuk partisipasi, diantaranya partisipasi buah pikir, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, dan partisipasi keterampilan.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan adalah minat, pengetahuan pariwisata dan pengalaman.